

USULAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN 2020

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Penanggung Jawab Pembuat Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
				Dibuka	Ditutup	
1	Laporan Hasil Pengawasan Internal	Inspektorat	Pasal 17 huruf a Undang- undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Atas ijin pihak yang melakukan pemeriksaan kasus atau atas perintah dari penegak hukum
2	Daftar IP Server Aplikasi yang ada di Pemkot Salatiga	Diskominfo	- Pasal 17 huruf c angka 6 Undang- undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (sistem persandian negara) - Undang-undang ITE (Pasal 30)	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Terbatas
3	Daftar Akun pengguna Aplikasi	Diskominfo	Pasal 17 huruf c angka 6 Undang- undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Terbatas

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Penanggung Jawab Pembuat Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
				Dibuka	Ditutup	
			Informasi Publik (sistem persandian negara)			
4	Topologi jaringan beserta IP dan Open dan Close port	Diskominfo	Pasal 17 huruf c angka 6 Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (sistem persandian negara)	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Terbatas
5	Lokasi dan Spesifikasi server	Diskominfo	Pasal 17 huruf c angka 6 Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Terbatas
6	Daftar Nomor Pokok Pajak Daerah	BKD	Pasal 17 huruf h Undang- undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Terbatas

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Penanggung Jawab Pembuat Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
				Dibuka	Ditutup	
7	Data Wajib Pajak	BKD	Undang-undang 28 tahun 2009	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunakan dari pihak yang tidak berkepentingan	Terbatas
8	Dokumen Surat Pertanggung Jawaban	BKD	Pasal 17 huruf i Undang- undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunakan dari pihak yang tidak berkepentingan	Terbatas, atas ijin pihak yang melakukan pemeriksaan kasus atau atas perintah dari penegak hukum
9	Database Kepegawaian PNS Kota Salatiga	Bkdiklatda	UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan daftar pribadi PNS melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Tidak terbatas, kecuali pemilik data mengizinkan.
10	Data monitoring permasalahan lingkungan yang sedang dalam proses penyidikan oleh Aparat Hukum	Dinas LH	Pasal 17 huruf a Undang- undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Terbatas
11	Identitas pelapor dalam aduan masyarakat	Dinas LH	Pasal 17 huruf h Undang- undang No. 14 Tahun 2008	Berpotensi disalahgunakan oleh orang	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Terbatas

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Penanggung Jawab Pembuat Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
				Dibuka	Ditutup	
			tentang Keterbukaan Informasi Publik	yang tidak berkepentingan		
12	Proses Aduan Masyarakat terkait permasalahan lingkungan	Dinas LH	Pasal 17 huruf h Undang- undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Terbatas
13	Laporan Komplikasi, kegagalan kontrasepsi	Daldu KB	Pasal 17 huruf h Undang- undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Atas ijin pihak yang melakukan pemeriksaan kasus atau atas perintah dari penegak hukum
14	Data akseptor by name by address	Daldu KB	Pasal 17 huruf h Undang- undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Terbatas
15	Daftar Pengguna Hak Akses Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK)	Disdukcapil	Pasal 17 huruf a angka 5 Undang- undang No. 14 Tahun 2008 tentang	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau	Terbatas

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Penanggung Jawab Pembuat Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
				Dibuka	Ditutup	
			Keterbukaan Informasi Publik		prasarana penegak hukum	
16	Database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	Disdukcapil	Undang-undang no 24 tahun 2013 ttg perubahan 23 tahun 2006 ttg adminstrasi kependudukan	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunakan dari pihak yang tidak berkepentingan	Terbatas
17	Data Pribadi Penduduk	Disdukcapil	1. Pasal 84 ayat (1) dan Pasal 85 Undang-undang No.023 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 2. Undang-undang No.24 Tahun 2013 3. Pasal 11 Permendagri no.61 tahun 2015	Mengungkapkan data pribadi dapat merugikan dan melanggar HAM	Menjaga penyalahgunakan dari pihak yang tidak berkepentingan	Tidak terbatas, kecuali pemilik data mengizinkan
18	Informasi pribadi pencari kerja	Dispernaker	Pasal 17 huruf h Undang- undang No. 14 Tahun 2008 tentang	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Tidak terbatas, kecuali pemilik data mengizinkan

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Penanggung Jawab Pembuat Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
				Dibuka	Ditutup	
			Keterbukaan Informasi Publik			
19	Informasi Dokumen Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Dispernaker	Pasal 17 ayat a Undang- undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat atau mengganggu penyelesaian kasus	Dapat mengganggu proses penyelesaian perselisihan.	Terbatas
20	Data Riwayat Medis Hewan	Distan	Undang-undang veteriner	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Dapat disalahgunakan yang mengganggu kepentingan umum	Terbatas
21	Data Korban Kekerasan terhadap perempuan	DP3A	Pasal 17 huruf h angka 1 Undang- undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkapkan data pribadi dapat merugikan dan melanggar HAM	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia untuk melindungi keamanan dan kenyamanan	Terbatas
22	Data Korban Kekerasan terhadap anak	DP3A	Pasal 17 huruf h Undang- undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkapkan data pribadi dapat merugikan dan melanggar HAM	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Terbatas

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Penanggung Jawab Pembuat Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
				Dibuka	Ditutup	
23	Data identitas pemohon izin	DPMPTSP	Pasal 17 huruf h Undang- undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia untuk melindungi keamanan dan kenyamanan	Terbatas
24	Rencana Investasi	DPMPTSP	Pasal 17 huruf h Undang- undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia untuk melindungi keamanan dan kenyamanan	Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang/ jasa selesai
25	Data Intelijen Daerah	Kesbangpol	Pasal 17 huruf c Undang- undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Tidak terbatas
26	Data Penyalahguna Narkoba di Kota Salatiga	Kesbangpol	Pasal 17 huruf h Undang- undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkapkan data pribadi dapat merugikan dan melanggar HAM	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia untuk melindungi	Terbatas

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Penanggung Jawab Pembuat Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
				Dibuka	Ditutup	
					keamanan dan kenyamanan	
27	Data Identitas Pelanggar Peraturan Daerah dan Perwali	Satpol PP	Pasal 17 huruf a Undang- undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana	Terbatas
28	Data Identitas Pelanggar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	Satpol PP	Pasal 17 huruf a Undang- undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana	Terbatas
29	Daftar Rekam Medis pasien	Dinas Kesehatan	Permenkes No 269 Tahun 2008	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Berisi tentang catatan kondisi Kesehatan pasien, pengobatan, rencana Tindakan dan terapi pasien yang harus	Terbatas

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Penanggung Jawab Pembuat Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
				Dibuka	Ditutup	
					terjamin kerahasiannya.	
30	Daftar Identitas pasien HIV/AIDS	Dinas Kesehatan	Kepmenaker No. KEP. 68/MEN/IV/2004	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Berisi tentang informasi kerahasiaan pasien meliputi identitas pasien, kegiatan konseling, tes HIV, pengobatan, perawatan pasien	Terbatas
31	Nomor Rekening pegawai	Bappeda	Pasal 17 huruf a angka 5 Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Berisi tentang informasi kerahasiaan pribadi	Terbatas
32	Nota Dinas	Bappeda	Pasal 17 huruf a angka 5 Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi mengganggu proses pembuatan kebijakan	Bersifat internal dan masih dalam proses	Terbatas
33	Nilai Rapor/Nilai Ujian peserta didik termasuk data pribadi siswa	Dinas Pendidikan	Pasal 17 ayat h Undang-undang No. 14 Tahun 2008	Mempengaruhi Psikologis Peserta Didik	Melindungi informasi pribadi	Terbatas

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Penanggung Jawab Pembuat Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
				Dibuka	Ditutup	
			tentang Keterbukaan Informasi Publik			
34	Kerahasiaan Naskah Soal yang belum dijadwalkan	Dinas Pendidikan	Permendikbud No.43 Tahun 2019 tentang Ujian diselenggarakan oleh Sekolah dan Ujian Nasional.	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga kerahasiaan dan keamanan naskah soal.	Terbatas